

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Gunadil Ukra (Dkk), 2016, *Data Base Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bone 2016*, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Bone
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta
- 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Membumi Publishing. Makassar
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta,
- Angger S. P. & Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Daan Sugandha. 1989. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Intermedia. Jakarta
- Friedman L. 2004. *Teori dan Falsafah Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. PT. Alumni. Bandung
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan : Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Anonim, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perum dan Percetakan. Balai Pustaka. Jakarta
- Anonim, Lembaga Administrasi Negara RI. 1992. *Sistem Administrasi Negara RI*. jilid II. CV. Haji Masagung. Jakarta
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta Press. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University press. Yogyakarta
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. CV. Sinar Baru. Bandung
- S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung Jakarta. Jakarta
- Salim HS. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekamto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta
- Victory Anus MH Pranda Puang. 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Deepublish. Yogyakarta
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994 *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Penerbit Rieneka. Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem, dan Upaya Pembenahan*, Grasindo. Jakarta

## **JURNAL**

- Moh. Asir, Bruce Anzwar, dan Elsa Aprina. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Pasport Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan*. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Balikpapan
- Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic, Narumi Bungas Gazali, 2019, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, Vol. 4, No. 1, Bina Hukum Lingkungan,

Retnadumillah Saliha, 2017, *Perizinan Pertambangan Batuan dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berwawasan Lingkungan*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, Neliti.com

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone

Peraturan Bupati Bone No. 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

## **WEBSITE**

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/3](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/3)

[www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com)

[www.suara.com](http://www.suara.com).



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan,  
Kode Pos 92713 No Telp. (0481) 26907

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 600/ 018 /K1-PR/DBMCKTR/VIII/2021

Dengan Hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa fakultas hukum atas nama :

Nama : FACHRIADI NANDAR  
No. Pokok : B 12115025  
Prodi : Hukum Administrasi Negara

Telah Melakukan penelitian pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.  
Bone

Watampone, 24 Agustus 2021

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG KABUPATEN BONE**  
An. Kepala Bidang Tata Ruang



**TEZZAR ARIESANTO, SE**

Pangkat : Penata Tk.I  
NIP. 19790322 200904 1 001



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG TATA RUANG**  
**SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG**

NOMOR S.O.P.	600/01/SOP-PR/DPU-PTR/V/2020
TGL. PEMBUATAN	18 MEI 2020
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	20 MEI 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PU & PENATAAN RUANG,  <b>H. ASKAR, SST. M.Si.</b> NIP.19681231 199803 1 042
NAMA S.O.P.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang</li> <li>Permen PU Nomor : 02/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Ruang</li> <li>Peraturan Daerah Kab.Bone No 4 Tahun 2011tentang Perizinan dan Penetapan Garis Sempadan Jalan Kabupaten.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang.</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai alur pemanfaatan ruang</li> <li>Menyiapkan Data (SMA/SMK, S1/S2)</li> <li>Surveyor (SMA/SMK, S1/S2)</li> <li>Penganalisa Data :S1/S2/ Ahli dalam bidang Tata Ruang.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Rekomendasi IMB</li> <li>SOP Persuratan</li> <li>SOP Surat Masuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang-Undangan dibidang tata ruang (PP,Perda,Perbub terkait tata ruang,serta kajian tentang tata ruang)</li> <li>Peta Tata Ruang (RTRW/RDTR)</li> <li>Kendaraan Bermotor,Komputer+print, GPS dan LCD, meteran.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	
Apabila SOP Pengawasan Pemanfaat Ruang tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat.	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	Kepala Dinas	Kabid Penataan Ruang	Kep. Seksi	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1. Menerima laporan lisan ataupun tertulis akan adanya indikasi ketidak sesuaian pemanfaatan ruang					Laporan masyarakat	10 menit	Laporan dicatat di buku agenda	
2. Tim membahas permasalahan, menyampaikan ke Pimpinan, mempersiapkan untuk peninjauan lokasi					Data data dan laporan masyarakat	45 menit	Draft surat tugas	
3. Disposisi ke Tim untuk melakukan peninjauan lokasi.					Data data dan laporan masyarakat, Draft surat tugas	10 menit	Surat tugas telah disetujui	
4. Melakukan survey/peninjauan lokasi, Tim mendiskusikan, meneliti, mengoreksi serta merumuskan hasil survey, membuat surat teguran.					Surat tugas yang telah disetujui	240 menit	Surat teguran	
5. Tim menyerahkan hasil survey lapangan dan surat teguranyang telah dibuat kepada, kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.					Konsep Surat teguran	10 menit	Surat teguran telah ditandatangani	
6. Mendistribusikan surat teguran					Surat teguran telah ditandatangani	15 menit	Surat teguran diserahkan ke pengguna manfaat ruang	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Jalan Yos Sudarso, Kode Pos 92713 No Telp. (0481) 26907, Watampone

Watampone, 3 Mei 2021

Nomor : 600/ 003 /V /WAS-TR/DMCKTR//2021  
Lamp : 1 (Satu) Lbr Foto  
Hal : Surat Teguran dan Pemberhentian  
Aktivitas

Kepada  
Yth.: **H. Muh. Alwi Dg. Makkelo**  
( **Harfana Halim Indah** )

Di -  
Tempat

Sesuai hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone dan hasil Koordinas dengan pihak ESDM Prov Sulawesi Selatan terhadap kegiatan atau aktivitas mengarah pada kegiatan Pertambangan yang terletak di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa poin:

1. Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bone dinyatakan Kecamatan Barebbo bukan menjadi Kawasan Peruntukan Pertambangan (pasal 41 ayat 2);
2. Bahwa Titik Koordinat S = 04°35'56.65" E= 120° 15'45.1692 dan sekitarnya merupakan tutupan lahan pertanian sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Pertambangan berupa Pengerukan Gunung / bukit adalah upaya kegiatan merubah Bentang Alam dan diperlukan kajian dampak Lingkungan yang disesuaikan dengan Pola Ruang dalam, RTRW Kab. Bone.

Sehubungan pada poin - poin diatas, dengan ini diminta kepada saudara untuk menghentikan semua aktivitas pertambangan dan upaya Perubahan Pola Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Bone serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS

**H. M. ASKAR, S.ST., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19681231 199803 1 042

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Selatan di Makassat
2. Kepala UPT ESDM Wil. V Prov Sulsel di tempat
3. Kepala Dinas Sat Pol PP Kab. Bone di tempat
4. Camat Barebbo di tempat
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DIANAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
JALAN LAKSAMANA YOS SUDARSO NO. TELP. (0481) 26907  
W A T A M P O N E



Lokasi : Desa Wellangi Kec. Barebbo